



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025



Visi :

Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera,
Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani

Misi I :

Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih,
akuntabel dan melayani

Kata Pengantar

Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari setiap bidang dan seksi serta usulan dari berbagai pihak. Renja Tahun 2025 ini merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Renstra 2021-2026.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah, memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 serta untuk *mereview* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, mitra kerja, maupun masyarakat secara umum. Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2025, kami berharap agar apa yang dituangkan dalam dokumen ini dapat terlaksana dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2024, serta sebagai acuan untuk pembangunan tahun selanjutnya.

Lubuk Basung, Juni 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Agam


SYATRIA, S.Sos, MSi
Pembina Utama Muda

NIP. 19690623 199308 1 001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	24
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika	26
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	31
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	34
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	34
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	36
4.1 Program dan Kegiatan	36
BAB V PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Kominfo ini merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Dinas Kominfo mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal. Didasarkan dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, bersih (*good and clear governance*) dan profesional yang didukung dengan pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.

1.2 Landasan Hukum

1. Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. **Sedangkan tujuan dari penyusunan**

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk tahun 2025 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan **tahun ini. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja.**

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu isu penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

4.1 Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tahun 2023, capaian rencana kerja tahun 2023 (n-1) dan capaian target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika pada urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan informatika. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada tahun 2023 antara lain :

1. Program Aplikasi Informatika

- a. Kegiatan:** Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan kebutuhan sistem teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta melayani pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur jaringan komputer yang telah menjangkau sebagian besar OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 576.000.000 **realisasi** Rp. 570.000.000,- kegiatan dilaksanakan berupa Pembangunan jaringan Fiber Optik dan pemeliharaan rutin serta penggantian alat yang rusak.

Hasil yang dicapai adalah terkoneksi jaringan komputer untuk OPD yang ada di Kabupaten Agam

- b. Kegiatan:** Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/ Kota.

Bertujuan: untuk menyediakan fasilitas penunjang data center secara bertahap dan terkelolanya server-server yang digunakan oleh pemerintah kabupaten agam secara terpusat,

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.447.677.908,- realisasi Rp. 1.065.689.854,- kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pengadaan server, penambahan daya listrik di ruangan data center yang semula 23.000 menjadi 66.000, integrasi aplikasi Pemkab agam, pemeliharaan infrastruktur data center.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Kegiatan: Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota

Bertujuan untuk terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah dalam meningkatkan penyebaran fasilitas informasi melalui media digital maupun media cetak.

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.221.588.352,- terealisasi sebesar Rp. 1.180.590.035,-

Hasil Yang Dicapai terkelolanya media komunikasi pelayanan publik seperti: Website, Media Sosial, Media Cetak, Youtube, PPID.

3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Bertujuan untuk menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan data yang di susun.

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 102.451.000,- terealisasi sebesar Rp. 92.033.400,-

Hasil Yang Dicapai terlaksananya buku Agam Dalam Angka, serta Pembinaan Nagari Statistik.

4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi pemerintah daerah.

Dengan alokasi dana sebesar Rp. 35.042.500,- terealisasi sebesar Rp. 31.741.000,-

Hasil Yang Dicapai adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan pengamanan informasi.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program(Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat Daerah Thn 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Thn Berjalan (Thn 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informasi									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

				2022	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN							
				-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD		2,147,404,289					
				-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD		441,066,449					
				-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			198,919,833					
				-	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah			94,593,995					

				Daerah									
				Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Informasi									
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik								
				- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik			1,431,069,957						
				Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan								

					pemerintah (%)							
				-	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah			584,556,967				
				-	Pengelolaan e-government di lingkungan Pemerintah			876,057,530				

				ntah Daerah Kabup aten									
				Program Penyelen garaan Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunak an data statistik dalam menyusun dan mengevalua si perencanaa n pembangun an daerah								
				Penyel enggar aan Statisti k Sektor al di Lingku p Daerah Kabup aten			76,369,605						
				Program Penyelen garaan Persandia	Indeks keamanan informasi								

				n untuk pengaman nan Informasi								
				Penyel enggaran Persandian untuk pengaman an Informasi Pemerintah Daerah		19,922,250						
			2023	Program Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor dan ASN							
				Admini strasi Keuan gan Perang kat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD		1,999,798,170	1,908,145,075	0.954169			
				Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja		466,107,926	433,720,428	0.930515			

					SKPD								
				-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah			83,492,080	77,110,000	0.923561			
				-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			322,659,250	303,633,115	0.941033			
				-	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			88,215,000	76,817,582	0.8708			
					Program Informasi dan Komunik	Persentase masyarakat yang menjadi							

				asi Publik	sasaran penyebaran informasi publik								
				-	Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota			1,221,588,352	1,180,590,035	1.034727			
					Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah (%)							
				-	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan			576,000,000	570,000,000	0.989583			

				oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
				Pengelolaan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten				1,447,677,908	1,065,689,854	0.736137			
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik								

					dalam menyusun dan mengevalua si perencanaa n pembangun an daerah								
				-	Penyel enggar aan Statisti k Sektor al di Lingku p Daerah Kabup aten			102,451,000	92,033,400	0.89 8316			
					Program Penyelen ggaraan Persandia n untuk pengama nan Informasi	Indeks keamanan informasi							
				-	Penyel enggar aan Persan dian untuk penga manan			35,042,500	31,741,000	0.90 5786			

				Informasi Pemerintah Daerah									
			2024	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan ASN	3.940.317.828							
				- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							33,845,750		
				- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD						2,826,902,637		
				- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD						408,185,841		

				Pengadaan Barang Milik Daerah - Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya						78,685,000		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional						357,702,894		
				Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik						98,434,440		
				Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Informasi		1,148,197,098							

				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik								
				- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik							1,148,197,098		
				Program Aplikasi Informatika	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah (%)	1,621,339,656							
				- Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh							605,000,000		

				Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah									
				Pengelolaan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten							1,054,223,076		
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi	1,621,339,656							

					si perencanaaa n pembangun an daerah								
				Penyel enggar aan Statisti k - Sektor al di Lingku p Daerah Kabup aten							137,000,000		
				Program Penyelen ggaraan Persandia n untuk pengama nan Informasi	Indeks keamanan informasi	25,500,000							
				Penyel enggar aan Persan dian - untuk penga manan Inform asi							25,500,000		

				Pemerintah Daerah										
--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

A. Standar Pelayanan Minimal Urusan Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota, harus memperhatikan target SPM yang sudah ditetapkan. Target Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika batas waktu pencapaian sampai dengan tahun 2023. Dua jenis pelayanan dasar Bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)

Pelaksanaan Pengelolaan E-Government (Infrastruktur jaringan internet, Aplikasi dan Sarana Prasarana)

2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional, melalui :

a. Media massa, seperti majalah, radio dan televisi

b. Media online, seperti website (media online)

c. Media tradisional, seperti pertunjukan rakyat

d. Media interpersonal, seperti sarasehan, ceramah, diskusi, dan lokakarya

e. Media luar ruang, seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho

3. Pengelolaan Statistik Sektor.

Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor

4. Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika terkait pelayanan dasar adalah tersedianya layanan informasi melalui perangkat elektronik untuk peningkatan penyebaran informasi. Indikatornya adalah jumlah layanan informasi melalui perangkat elektronik, seperti, website Pemerintah Kabupaten Agam, media massa dan media sosial seperti facebook, you tube, twitter dan instagram.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN AGAM

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra OPD		Realisasi Capaian		Ctt Analisi
				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2022	Thn 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)	Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.		65	75	65	75	
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Cukup Informatif)	a). Media Massa(Majalah, Radio, Televisi)		57	65	57	65	
		b).Media baru(Media Online)						
		c).Media Tradisional(Pertunjukan Rakyat)						

		d). Media Interpersonal (Ceramah, Diskusi, Sarasehan, Lokakarya)					
		e).Media Luar Ruang(buletin, leaflet, brosur, baliho)					
		Pengembangan dan Pemberdayaan KIM					
		a.Cakupan Tingkat Kecamatan					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika

A. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tupoksi

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> Konektivitas Broadband Nasional (implementasi 4G dan konsolidasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan pengelolaan informasi komunikasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> Akses masyarakat masih terbatas terhadap informasi di beberapa 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya Regulasi Pemerintah Pusat di bidang Kominfo,

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten /Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	operator telekomunikasi Cyber Security & Governance, e-Government, e-Commerce. • Digitalisasi Televisi. • <i>Government Public Relation</i>	• Pengelolaan aplikasi informatika • Pengelolaan persandian untuk keamanan informasi • Penyelenggaraan statistik sektoral • Tata kelola organisasi	kecamatan • Terbatasnya sarana dan prasarana TIK, telekomunikasi dan penyiaran • Terbatasnya SDM yang trampil dan profesional di bidang TIK, Kominfo, Persandian dan Statistik • Belum tersedianya Masterplan e-government Kab. Agam	persandian dan statistik • Ketersediaan dana pembangunan APBN/APBD/Swadaya • Optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Aset yang ada. • Optimisme Kepala Daerah

Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya dapat dilihat ada tabel berikut:

Tabel 2.3.1
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	• Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi	• Dalam menyelesaikan permasalahan	• Belum adanya Jaringan GSM di beberapa wilayah di 4	• Pengembangan sistem jaringan di upayakan selalu

si	<p>ketersediaan dan kesiapan SDM di bidang teknologi informasi lebih sulit dibandingkan dengan masalah teknologinya.” PNS yang mempunyai kemampuan TIK di beberapa kantor OPD Kabupaten Agam yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, hanya sebagai kecil orang saja, dan beberapa diantaranya belum tentu berlatar belakang pendidikan di bidang Informatika.</p>	<p>Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih terbatasnya sambungan telepon otomatis di beberapa kecamatan 	<p>mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sentral Telepon Otomatis (STO) telah dibangun di Lubuk Basung, Maninjau dan Baso dengan memanfaatkan kabel Optic • Jumlah BTS yang ada saat ini sebanyak 121 BTS tersebar di beberapa Kecamatan • Pengembangan sistem jaringan diupayakan selalu mengikuti perkembangan teknologi telekomunikasi
----	---	---	---

B. Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

a. Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Era globalisasi telah menempatkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) kedalam isu strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas jarak, ruang dan waktu. TIK berkembang sangat cepat dan hampir seluruh aspek kehidupan telah menggunakan TIK.

Keberadaan TIK membuat aktifitas yang terkait dengan pekerjaan, pendidikan dan hiburan terakait erat dengan pemanfaatan TIK. Menyusun dokumen elektronik, melalukan perhitungan, menganalisa data dan sebagainya baik di masyarakat maupun organisasi pemerintahan sekalipun.

b. Peningkatan Layanan telekomunikasi dan internet

Kedudukan telekomunikasi dan internet telah menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang, baik di kota-kota besar sampai ke pelosok daerah. Semuanya sudah hampir mengenal internet dan menggunakan internet untuk berbagai keperluan, baik elemen pemerintah daerah (government), masyarakat (cosumer/citizens) dan kalangan bisnis (business). Ketersedian layanan ini akan memperlancar hubungan dan transaksi elektronik diantara elemen tersebut yaitu hubungan C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, G2C. Hampir semua transaksi yang terjadi saat ini telah menggunakan internet, seperti transaksi perbankan dan transaksi-transaksi lainnya.

c. Pengaturan menara telekomunikasi

Untuk memenangkan persaingan, para operator telekomunikasi akan selalu berusaha meningkatkan layanannya, maka keberadaan menara BTS menjadi sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan upaya memberikan jaminan akan terjaganya kualitas dan kuantitas coverage area bagi para pengguna jasa telekomunikasi.

Dalam hal menara telekomunikasi lebih terkait dengan aspek prasarana yang dibangun dan merupakan kewenangan pengaturannya ada pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang mengatur tata ruang daerahnya kemudian membuat pengaturan menara telekomunikasi bersama di daerahnya masing-masing. Pengaturannya tidak hanya bertujuan agar tata kota menjadi lebih estetik dan harmonis dengan tata ruang dan wilayah di sekitarnya. Dari segi bisnis, menara telekomunikasi bersama juga dapat mendorong efisiensi dan menjadi sumber pendapatan daerah.

d. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta berkaitan dengan kepentingan publik merupakan informasi publik terbuka. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 64 (1). Dengan diterbitkannya undang-undang keterbukaan Informasi Publik berarti Pemerintah Daerah Kabupaten Agam sebagai lembaga publik harus mengedepankan hak setiap masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan informasi yang berasal dari setiap organisasi yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dengan seluas-luasnya selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang ini. Akses terhadap informasi publik tersebut dapat diperoleh baik secara langsung maupun melalui berbagai media yang ada saat ini.

e. Statistik Sektoral

Statistik sektoral merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kondisi saat ini, untuk pelaksanaan urusan statistik sektoral di Kabupaten Agam belum terakomodir dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika. Sebelum ini pelaksanaan urusan statistik sektoral dilaksanakan oleh Bappeda. SOTK Bappeda pun saat ini tidak mengakomodir pelaksanaan urusan statistik sektoral.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu segera dilakukan analisis dan revisi kelembagaan perangkat daerah yang ada agar pelaksanaan urusan pemerintahan bidang statistik dapat dilaksanakan.

f. Persandian untuk keamanan informasi

Belum memiliki aparatur ahli sandi ataupun fungsional persandian
Masih rendahnya pemahaman terhadap emplementasi persandian

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 disusun telah berdasarkan hasil analisis kebutuhan, sehingga tidak ada perubahan dalam program dan kegiatan. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika terdiri dari 5 program 11 kegiatan seperti Tabel di bawah:

Tabel 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN
TAHUN 2024

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator /Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab.Agam	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor ASN	3,803,756,562	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Agam	Jangka waktu pemenuhan pembayaran honorarium pengelola kegiatan	33,845,750	
	Adminstarsi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Agam	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan PD	2,826,902,637	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Agam	Prensentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional	408,185,841	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya	78,685,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar opsional	357,702,894	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	98,434,440	
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab.Agam	Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	1,148,197,098	
	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Presentase informasi public yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/Kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik	-	
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab.Agam	Jumlah pembangunan Aplikasi e-government	1,659,223,076	
	- Pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Jumlah Akses Internet yang di fasilitasi	605,000,000	
	- Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah	Kab.Agam	Jumlah Kegiatan pengelolaan e-gov yang dilaksanakan(aplikasi, Sarpras, infrastruktur)	1,054,223,076	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab.Agam	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	137,000,000	
	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kab.Agam	Kab.Agam	Jumlah penyusunan data statistik sektoral yang dilaksanakan	-	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab.Agam	Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah	25,500,000	
	- Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota berbasis elektronik/ non elektronik	Kab.Agam	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	-	
Jumlah				6,773,676,736	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra. Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan Peraturan-peraturan lainnya seperti:

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Agam Tahun 2005-2025.(Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2025 Nomor 11)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.
5. Peraturan Bupati Agam Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen dan pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025
1	Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Penerapan sistim pemerintahan berbasis elektronik	Persentase OPD yang telah menerapkan SPBE	90
		Meningkatnya kualitas data dan layanan informasi.	1. Persentase OPD yang menggunakan data Statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 2. Peringkat keterbukaan informasi badan publik	100 76
		Meningkatkan Keamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	65
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Nilai RB perangkat daerah berdasarkan PMPRB	34,42

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Untuk tahun 2025 mempunyai Lima Program, sembilan kegiatan dan dua puluh tujuh sub kegiatan dengan total dana sebesar Rp. 9.058.255.508,- (Sembilan miliar lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ratus delapan rupiah) seperti daftar terlampir:

4.1 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Agam, pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Komunikasi dan Informatika serta faktor pengembangan kecamatan. Jumlah program yang direncanakan pada Tahun 2025 adalah 5 program, 9 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan lokasi program adalah wilayah Kabupaten Agam. Total kebutuhan dana /pagu indikatif sejumlah Rp. 9.058.255.508,-

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tahun 2025 seperti tabel berikut:

Tabel 4.1

**Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab.Agam Tahun 2025**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor dan asn	Disko mifno	95 persen	3,830,863,848	DAU		95 persen	90,000,000
	Administra si Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan gaji dan pengelolaan keuangan perangkat daerah		100 persen	2,889,881,551			100 persen	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		32 Orang / Buln	2,856,035,801			32 Orang / Buln	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan /		12 Laporan	33,845,750			12 Laporan	

		Semesteran SKPD							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD		100 persen	407,237,252			100 persen	45,000,000
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	8,487,275			1 Paket	
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	40,114,617			3 Paket	45,000,000
-	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan		4 Paket	25,606,360			4 Paket	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	333,029,000			12 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin		3 Unit	79,120,695			3 Unit	45,000,000

	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	lainnya						
	- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 unit	32,340,000			4 unit	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	38,780,695			4 unit	45,000,000
	- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	8,000,000			1 unit	0
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional	100 persen	356,176,350			100 persen	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	95,416,350			12 Laporan	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	260,760,000			12 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik	100 persen	98,448,000			100 persen	

-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3 Unit	67,898,000			3 Unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		20 unit	20,630,000			20 unit	
-	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	9,920,000			1 unit	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	Dis komi nfo	45 persen	1,649,904,660	DAU		45 persen	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase informasi public yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/Kota sesuai amanat UU No 14		100 persen	1,649,904,660			100 persen	

		Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik						
-	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1 terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3 aktif dalam kegiatan relasi media		35 Laporan	1,018,571,795			35 Laporan
-	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		17 komunitas	100,000,000			17 komunitas
-	Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		3 permohonan	9,432,705			3 permohonan

-	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		20 rekomendasi	5,670,000			20 rekomendasi	
-	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		6 media	360,646,560			6 media	
-	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik		50 konten	155,583,600			50 konten	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Dis komi nfo	50 persen	3,451,497,000	DAU		50 persen	1,850,000,000
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang telah menyelenggarakan SPBE		95 persen	3,451,497,000			95 persen	1,850,000,000

-	Penyelenggaraan Pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		1 Dokumen	1,501,000,000			1 Dokumen	
-	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		5 aplikasi	957,500,000			5 aplikasi	550,000,000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas				47,997,000				550,000,000
-	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		43 perangkat	282,000,000			43 perangkat	
-	Penyediaan Akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah perangkat daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas		20 perangkat daerah	663,000,000			20 perangkat daerah	750,000,000

		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah	Dis ko mi nfo	40 Perse n		DAU	40 Perse n	
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah		40 Perse n	105,99 0,000		40 Perse n	
	-	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		3 Doku men	105,99 0,000		3 Doku men	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA N INFORMASI	Indeks Keamanan informasi Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah indeks keamanan informasi	Dis ko mi nfo	300 indek s 50 perse 70 Perse n	20,000 ,000	DAU	300 indek s 50 perse 70 Perse n	

	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi		8	20,000,000		8	
	- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		1 laporan	20,000,000		1 laporan	

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Agam Tahun 2025 dengan mengaju kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam.

Rencana Kerja tahun ini memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan dengan menggunakan seluruh potensi yang ada dalam institusi Diskominfo, dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku, dengan memperhatikan:

1. Penataan personil sesuai dengan kompetensinya.
2. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga di lingkungan Pemerintah daerah dan stakeholder dengan membangun nilai kebersamaan.
3. Mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemerintah (Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor: 32/2004 Pasal 10).
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparatur pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi.

Akhirnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintah yang baik dan akuntabel.

Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kab. Agam


SYAFRIA, S.Sos, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19690623 199308 1 001